

EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KOTA BALIKPAPAN

Caya
caya_94@yahoo.com
Rusyadi
rusyadi@unm.ac.id
Patahuddin
patahuddin@unm.ac.id

Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar

Abstract: *The purpose of the study was to find out the selection mechanism for students receiving the Indonesia Smart Program (PIP), the PIP implementation process, and the PIP results at the Elementary School level in Balikpapan City. This study focused on the elementary school level in the city of Balikpapan by using the STAKE evaluation model that uses a qualitative research approach. The results of the study revealed that the PIP recipient selection mechanism was in accordance with the PIP implementation guidelines, while in the implementation process, it was not in accordance with the instructions of PIP implementation. Because the Balikpapan City Education Office and the School do not yet know the cancellation mechanism for PIP grant recipients who do not meet the requirements as stipulated in the provisions of PIP recipient. PIP at the Elementary School level in Balikpapan City has not yet fulfilled the overall of PIP goal, because the amount of funding received by students does not meet the personal costs of students. However, the program can be continued with a number of notes.*

Keywords: *Indonesia Smart Program, evaluation model of STAKE, qualitative*

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme seleksi siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP), proses pelaksanaan PIP, dan hasil PIP pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Balikpapan. Penelitian ini difokuskan pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Balikpapan dengan menggunakan model evaluasi STAKE yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme seleksi penerima PIP sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP, sedangkan pada proses pelaksanaan, belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP. Karena pihak Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dan Sekolah belum mengetahui mekanisme pembatalan penerima bantuan dana PIP yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan penerima PIP. PIP pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Balikpapan belum memenuhi keseluruhan dari tujuan PIP, karena jumlah bantuan dana yang diterima oleh siswa belum memenuhi biaya personal siswa. Akan tetapi, program dapat dilanjutkan dengan beberapa catatan.

Kata Kunci: *Program Indonesia Pintar, model evaluasi STAKE, kualitatif*

1. Pendahuluan

Prinsip penyelenggaraan pendidikan, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dalam segi penilaian pembelajaran dan hasil belajar suatu sekolah kualitasnya dinilai kurang yaitu dapat terjadi karena; a) peserta didik sendiri tidak memiliki motivasi belajar dalam proses pembelajaran, b) guru dan personal yang kurang tepat, c) materi yang tidak atau kurang cocok, d) metode mengajar dan sistem evaluasi yang tidak memadai, e) kurangnya sarana penunjang, f) sistem administrasi yang kurang tepat (Sudjana, 2006: 12).

Ketidakmampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan, karena mahal biaya pendidikan. Kemiskinan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh.

Jumlah siswa putus sekolah tahun 2016/2017 di Indonesia mencapai 187.078 siswa, Kalimantan Timur menyumbang angka putus sekolah sebanyak 1.946 siswa, khusus tingkat sekolah dasar sebanyak 438 siswa yang putus sekolah (Pusat Data dan Statistik

Pendidikan dan Kebudayaan: 2016/2017). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS: 2016/2017) Kota Balikpapan, angka putus sekolah di Kalimantan Timur pada tingkat Sekolah Dasar (SD) adalah 0,00%, pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1,82%, dan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 19,00%. Khusus di Kota Balikpapan angka putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) 0,00%, pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 0,82%, dan pada tingkat Sekolah Menengah Atas sebanyak 16,07%. Hal ini membuat pemerintah untuk melakukan suatu Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk membangun keluarga yang produktif (Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014).

Akan tetapi, pemikiran yang berkembang dimasyarakat adalah hanya orang-orang yang dekat dengan penyelenggara program yang dapat menjadi penerima bantuan dana PIP, hal ini disebabkan karena fenomena yang terjadi terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima bantuan dana PIP, sedangkan ada siswa yang kurang atau tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dana PIP. Sehingga siswa tersebut kesulitan dalam memenuhi biaya personalnya, seperti membeli buku, alat tulis, pakaian seragam sekolah, sepatu, tas dan uang saku. Kesulitan yang dihadapi oleh siswa ini menjadi alasan siswa untuk malas bersekolah. Untuk itu

diperlukan penelitian untuk mengevaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) dengan menggunakan Model Stake.

2. Tinjauan Pustaka

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Anas, 2013: 1). Lebih terperinci oleh Daniel L. Stufflebeam (2003) dalam Wirawan (2016) bahwa evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, melaporkan, dan menerapkan informasi deskriptif dan menghakimi tentang beberapa kelebihan, probabilitas dan kepentingan suatu objek, untuk memandu keputusan layak, membuat, mendukung akuntabilitas, menyebarkan praktik yang efektif, dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat.

Untuk pengertian program, Widoyoko (2012) berpendapat bahwa program didefinisikan sebagai satu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam program yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Demikian juga Wirawan (2016) berpendapat bahwa program adalah kegiatan atau kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Sejalan dengan pendapat Wirawan, Arikunto (2008: 1) menyatakan secara umum "Program" dapat diartikan sebagai "rencana" jika program ini selesai program dengan suatu kesatuan atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau

implementasi dari suatu kebijakan, dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Sedangkan menurut Herman, program adalah sesuatu yang dicoba dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh (Tayibnapi, 2008: 9).

Menurut Widoyoko (2012: 10) berpendapat evaluasi program adalah proses yang sistematis serta berkesinambungan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, dan menyajikan informasi tentang implementasi rancangan program yang telah disusun untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam penagambilan keputusan, menetapkan kebijakan, maupun merancang program selanjutnya.

Program PIP merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. Sasaran utama PIP pada tingkat Sekolah Dasar adalah peserta didik pemegang KIP, peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin, dan peserta didik dengan pertimbangan khusus (Kemdikbud, 2018).

Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi stake. Menurut Tayibnapi (2008) bahwa Stake mengidentifikasi tiga tahap dari evaluasi program pendidikan, yaitu: *antecedents* (masukan), *transaction* (proses), dan *outcomes* (hasil). Dalam model ini ketiga tahap dibandingkan

tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar absolut, untuk menilai manfaat program.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Manajemen Data Dinas Pendidikan Balikpapan Bidang Pendidikan Dasar, Operator Program Indonesia Pintar, Kepala SDN 001 Balikpapan Barat, Kepala SDN 003 Balikpapan Utara, Kepala SDN 005 Balikpapan Tengah, Ketua RT 017 Baru Ulu Balikpapan Barat, Ketua RT 001 Mekar Sari Balikpapan Tengah, Ketua RT 061 Muara Rapak Balikpapan Utara, Relationship Manager Bank BRI Balikpapan, dan orang tua siswa penerima dana PIP pada tingkat sekolah dasar di Kota Balikpapan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan mengumpulkan data dari dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Model Evaluasi Stake

yang melalui tiga tahap yakni *antecedents* (masukan), *transaction* (proses), dan *outcomes* (hasil). Aktivitas dalam analisis data ini terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan.

Analisis Kualitatif Instrumen pendukung lainnya dalam penelitian ini terlebih dahulu divalidasi oleh pakar sebelum digunakan.

4. Hasil dan Pembahasan

Evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar dimulai dari aspek masukan, aspek proses hingga aspek hasil. Adapun Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar merupakan patokan yang digunakan dalam perumusan indikator instrumen pada penelitian ini, dengan melakukan evaluasi dengan model STAKE yang mengidentifikasi tiga tahap dari evaluasi program pendidikan, yaitu: *antecedents* (data penerima PIP, tahap seleksi, kesiapan penerima program, dan kesiapan penyelenggara program), *transaction* (sosialisasi, prosedur pelaksanaan, tahap penetapan penerima dan tahap pencairan dana), dan *outcomes* (pemanfaatan dana, siswa, laporan pelaksanaan PIP, perubahan penerima serta monitoring dan evaluasi program).

Pada mekanisme seleksi, pihak sekolah bertugas mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP ke seluruh warga sekolah; menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) pemilik KIP yang tidak bersekolah sebagai calon peserta didik/warga belajar pada saat rentang pelaksanaan PPDB dan diusulkan sebagai calon penerima dana PIP;

mengidentifikasi peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan memutakhirkan (updating) data peserta didik calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar; serta mengidentifikasi, menseleksi, mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang sesuai dengan sasaran prioritas sebagaimana ketentuan penerima PIP dan memutakhirkan (updating) data peserta didik sebagai calon penerima dana PIP ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar. Pada mekanisme seleksi tahap pengusulan, disimpulkan bahwa pihak Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dan pihak sekolah sudah melaksanakan mekanisme seleksi nama calon penerima bantuan dana PIP dengan baik sesuai dengan mekanisme tahapan pengusulan yang terdapat pada petunjuk pelaksanaan PIP tahun 2018.

Pada proses pelaksanaan PIP, pihak memiliki peran dan fungsi menurut petunjuk pelaksanaan PIP tahun 2018 yaitu menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana PIP telah siap diambil; bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik yang diusulkan sebagai calon penerima dana PIP; mengusulkan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota perihal pembatalan bantuan dana PIP yang tidak memenuhi ketentuan sebagai penerima PIP berdasarkan hasil validasi sekolah/lembaga; membuat Surat Keterangan Kepala Sekolah sebagai persyaratan pencairan dana oleh peserta didik di bank penyalur dan/atau menyiapkan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan; memantau proses pencairan dana PIP di bank/lembaga

penyalur; mendata/melaporkan peserta didik yang sudah mencairkan dana PIP ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya; menghimbau peserta didik penerima PIP agar menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan penggunaan dana, terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun, disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah, dan menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela.

Pada petunjuk pelaksanaan PIP tahun 2018, terdapat mekanisme pembatalan penerima bantuan dana PIP. Ada beberapa kasus yang dapat diusulkannya pembatalan. Dengan mekanisme yaitu Kepala sekolah/lembaga melakukan identifikasi atas status siswa penerima PIP, apabila hasil identifikasi ditemukan peserta didik telah meninggal dunia, putus sekolah, tidak diketahui keberadaannya, menolak menerima bantuan dana PIP, maka kepala sekolah/lembaga melaporkan status siswa tersebut kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan validasi atas laporan dari kepala sekolah/lembaga, hasil validasi dilaporkan kepada direktorat terkait sebagai rekomendasi untuk pembatalan bantuan dana PIP; apabila pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan yang menyebabkan peserta didik tidak memungkinkan untuk menerima, maka dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melaporkan ke direktorat terkait sebagai rekomendasi untuk pembatalan; Kementerian yang menangani bidang pendidikan melalui KPA menerbitkan

SK pembatalan berdasarkan rekomendasi; Pejabat Pembuat Komitmen mengembalikan dana PIP ke kas negara berdasarkan rekomendasi berdasarkan SK pembatalan.

Setiap sekolah memiliki visi dan misi yang berbeda, akan tetapi semua mengacu kepada visi dinas pendidikan kota Balikpapan yaitu “Terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang prima untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia”. Dengan misi yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi”. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan sangat terbantu dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) dalam hal memenuhi kebutuhan sekolah bagi siswa miskin/rentan miskin. Dengan adanya PIP ini, siswa miskin/rentan miskin dapat terpenuhi kebutuhan sekolahnya dan diharapkan dapat menjadikan siswa lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi.

PIP dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya motivasi siswa sehingga dapat mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah. Dengan begitu, PIP menjadi salah satu solusi dalam memecahkan masalah di dunia pendidikan. PIP bertujuan membantu biaya personal pendidikan yang meliputi membeli buku tulis, membeli pakaian seragam sekolah, membeli perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya), membiayai transportasi peserta didik ke sekolah, uang saku peserta didik, biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik formal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis evaluasi program, maka dapat disimpulkan dan dikemukakan saran serta rekomendasi sebagai berikut:

1. Mekanisme seleksi siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Balikpapan sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada tingkat Sekolah Dasar.
2. Proses Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Balikpapan belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Hal ini disebabkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota dan pihak sekolah belum mengetahui mekanisme pembatalan penerima bantuan dana PIP yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan penerima PIP.
3. Hasil dari Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Balikpapan belum memenuhi keseluruhan dari tujuan program. Bantuan dana PIP yang diterima hanya mampu memenuhi sebagian biaya personal peserta didik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Tingkat Sekolah Dasar di Kota Balikpapan. Saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kota

Bagi dinas pendidikan kota, diharapkan dapat bekerja sama dalam melakukan sosialisasi mengenai kebijakan Program

Indonesia Pintar. Sehingga pihak pelaksana kebijakan di sekolah benar-benar dapat memahami dengan baik mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Selain itu, dinas pendidikan kota diharapkan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya yaitu: mengusulkan kepada Direktorat Pembinaan SD/SMP perihal pembatalan penerima PIP yang dipegang oleh peserta didik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan penerima PIP.

2. Bagi Sekolah

Bagi sekolah, kepala sekolah dan operator PIP yang ditunjuk dapat mengikuti sosialisasi kebijakan Program Indonesia Pintar agar dapat menambah wawasan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam pelaksanaan program. Sekolah diharapkan agar dapat menjalankan peran dan fungsinya yaitu: mengusulkan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota perihal pembatalan penerima PIP yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan penerima PIP, serta mendaftarkan/melaporkan peserta didik yang sudah mencairkan dana PIP ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan, maka peneliti merekomendasikan agar program ini harus dilanjutkan dengan memperhatikan catatan-catatan sebagai berikut:

1. Mengadakan sosialisasi kebijakan Program Indonesia Pintar kepada penyelenggara program yang meliputi kepala sekolah, operator PIP di sekolah, operator PIP Dinas Pendidikan, dan penyelenggara lain yang bertugas sebagai pengambil kebijakan dalam pelaksanaan program.
2. Membuat iklan sosialisasi program mengenai tujuan, sasaran dan manfaat program di media elektronik, media cetak maupun media sosial agar masyarakat dapat menambah wawasan mengenai Program Indonesia Pintar dan ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan program.
3. Menambah jumlah bantuan dana yang diterima, agar bantuan dapat memenuhi seluruh biaya personal peserta didik.
4. Jumlah bantuan dana yang diterima oleh peserta didik di setiap kota sebaiknya mengacu pada tingkat biaya hidup di setiap kota tersebut.
5. Membuat kriteria calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar yang menjadi acuan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota dalam mengambil kebijakan dan menetapkan layak atau tidak peserta didik mendapatkan bantuan dana PIP.

Daftar Pustaka

- Sudjana, N. 2006. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- BPS Balikpapan. 2016. *Kota Balikpapan Dalam Angka*.

- Balikpapan: Badan Pusat Statistik Balikpapan.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik.
- Widoyoko, Eko Putro. 2012. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. & Jabbar, C.S.A. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan; Pedoman Teoeretis Praktis, Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tayibnapi, F. Y. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Laporan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (Online)*, (<http://pipd.kemdikbud.go.id/manajemen/>, Diakses 08 Oktober 2018)